

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Erisa Nada Dewanti¹; Farid Setiawan²; Majelis Rena Tobasa³; Pemi Ediansyah⁴
Universitas Ahmad Dahlan
erisa1900031320@webmail.uad.ac.id ; farid.setiawan@pai.uad.ac.id

Abstract

Implementation is the most important policy element, and the policy implementation process is a very important final determinant of policy making. Policy implementation is an activity that is seen after a valid direction has been issued from a policy which includes efforts to manage inputs to produce outputs or outcomes for the community. The implementation of education policy is one of the activities in the policy process that determines a policy in contact with equal educational stakeholders can be accepted by the community. Policy implementation is a complicated matter with a complex process. This journal article discusses the implementation of education policy implementation in Indonesia, and the research method used is qualitative by quoting from various sources. The purpose of the research is to obtain information about the implementation of educational policies, influencing factors, approaches, methodologies, and several probes of education in Indonesia. The results of this study are, 1. The implementation of educational policies is the implementation of the results of policies set by officials related to the implementation of education, 2. Factors that influence the implementation of educational policies, among others, resources, communication, disposition, and structure, 3. Approach in implementation education is top down, bottom up, procedural and managerial, and also political approaches.

Keywords : *Implementation; Policy; Education*

Abstrak : Implementasi adalah elemen kebijakan yang paling penting, dan proses implementasi kebijakan adalah penentu akhir yang sangat penting dari pembuatan kebijakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan salah satu aktifitas dalam proses kebijakan yang menentukan sebuah kebijakan bersentuhan dengan stakeholder pendidikan setara dapat diterima oleh masyarakat. Implementasi kebijakan merupakan hal yang rumit dengan proses yang kompleks. Artikel jurnal ini membahas mengenai implementasi penerapan kebijakan pendidikan di Indonesia, dan metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan mengutip dari berbagai sumber. Tujuan dari penelitian yaitu memperoleh informasi tentang implementasi kebijakan pendidikan, faktor yang mempengaruhi, pendekatannya, metodologi, serta beberapa permasalahan pendidikan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini yaitu, 1. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan pelaksanaan dari hasil kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat terkait pelaksanaan pendidikan, 2. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan antara lain, sumber daya,

komunikasi, disposisi, dan struktur, 3. Pendekatan dalam implementasi pendidikan dilakukan secara top down, bottom up, prosedural dan manajerial, serta pendekatan politik.

Kata Kunci : Implementasi; Kebijakan; Pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah suatu permasalahan yang sangat pokok bagi negara. Pendidikan adalah sarana utama untuk meningkatkan bakat, sehingga Anda dapat mengoptimalkan potensi bakat Anda dan menggunakannya dengan cara yang terbaik dan bijaksana. Munculnya suatu kebijakan karena adanya masalah yang melatarbelakanginya, sehingga menjadi pedoman atau strategi untuk menjawab permasalahan yang ada. Kebijakan merupakan sebuah keputusan yang dibuat oleh suatu badan atau badan pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mencapai suatu tujuan pemerintahan, baik secara administratif, legislatif, maupun yudikatif.

Dalam melakukan keputusan kebijakan ada dua hal yang harus dipertimbangkan, yaitu sistem nilai yang berlaku dan faktor situasional. (Anwar, 2014) Kebijakan tersebut didasarkan pada hukum yang jelas sehingga diharapkan dapat menguntungkan banyak orang. Kebijakan pendidikan memiliki kriteria khusus yaitu tujuan instruktif, sudut pandang yang layak, ide operasional, dibuat oleh ahli, bisa dinilai, dan memiliki sistematika. (Azza N et al., 2021) Menerapkan kebijakan pendidikan merupakan isu penting. Dalam implementasi kebijakan pendidikan, langkah evaluasi dapat dilakukan untuk mengecek kebijakan yang diterapkan.

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. (Kemendikbud RI, 2020) Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi adalah elemen kebijakan yang paling penting, dan proses implementasi kebijakan adalah penentu akhir yang sangat penting dari pembuatan kebijakan secara keseluruhan, dan tidak peduli seberapa bagus perumusan dan perumusan kebijakan yang dihasilkan, perumusan adalah proses implementasi. (Yuliah, 2020)

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan. Sumber kajian artikel ini adalah buku, tesis, artikel atau jurnal, serta prosiding yang sesuai dengan tema atau topik yaitu implementasi kebijakan pendidikan islam di Indonesia. (Assingily, 2021) Adapun sumber didapat melalui berbagai media cetak atau buku dan media elektronik dengan google scholar maupun website terkait. Pengecekan data pada artikel ini menggunakan berbagai bahan referensi agar hasil yang didapatkan maksimal. Langkah yang ditempuh dalam penelitian ini yaitu dengan membaca, mencatat, kemudian mengolah data. (Setiawan et al., 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Implementasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi kebijakan pendidikan bermakna sebuah proses berkaitan dengan tingkah laku suatu badan administratif yang melaksanakan program. Proses ini juga berhubungan dengan hukum, politik, dan sosial ekonomi yang mencakup pelaksana program baik langsung maupun tidak langsung. Dalam melakukan implementasi kebijakan, ada beberapa proses yang harus dilalui.

Menerapkan kebijakan pendidikan seringkali lebih kompleks daripada proses perumusan. Pelaksanaan kebijakan pendidikan adalah terlaksananya program kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh lembaga atau pejabat berwenang dari lembaga tersebut. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

B. Pendekatan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan

Dalam implementasi Pendidikan ada beberapa pendekatan yaitu *top down* dan *bottom up* (Setiawan et al., 2020) :

1. Pendekatan *top down*

Pendekatan *top down* merupakan pendekatan yang digunakan untuk menurunkan alternatif kebijakan yang bersifat abstrak menjadi tindakan konkrit.

2. Pendekatan *bottom up*

Pendekatan *bottom up* adalah pendekatan yang berasal dari bawah atau masyarakat yang diawali dengan aspirasi, permintaan, dan dukungan dari masyarakat.

Selain itu, ada pula pendekatan dalam implementasi kebijakan pendidikan yang lain (Fatayati, 2019) seperti :

1. Pendekatan prosedural dan manajerial

Pendekatan ini lebih fokus pada upaya untuk mengembangkan proses dan prosedur yang relevan termasuk prosedur manajerial serta yeknik manajemen yang tepat.

2. Pendekatan politik

Pendekatan politik merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada berbagai faktor politik atau kekuasaan yang dapat membantu atau mebgambat proses implementasi kebijakan

C. Faktor-faktor Yang Berpengaruh Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan

Ada beberapa faktor yang berpengaruh menurut George C. Edwards III (Mulyono, 2009) :

1. Komunikasi

Komunikasi harus dilakukan secara jelas dan terperinci agar tidak terdapat perbedaan interpretasi atau kesalahan komunikasi. Artinya, penerapan kebijakan tersebut harus bisa diterima oleh seluruh pegawai dan harus memiliki pemahaman yang jelas dan akurat tentang maksud dan tujuan kebijakan tersebut. Ada tiga hal yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan aspek komunikasi: :

- a. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik.
- b. Kejelasan informasi
- c. Konsistensi dalam menyampaikan informasi.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud antara lain jumlah anggota, keahlian pelaksana, informasi relevan yang memadai untuk melaksanakan kebijakan, kewenangan mengelola program sejalan dengan yang diharapkan, dan adanya fasilitas pendukung, yaitu sumber daya manusia. Hal tersebut diperuntukan dalam

melaksanakan kegiatan program seperti pembiayaan dan infrastruktur. Bakat yang tidak memadai mempengaruhi penyampaian program yang tidak memadai. Untuk itu diperlukan manajemen talenta yang baik untuk meningkatkan kinerja program. Bagian urgen lainnya yaitu pengadaan kantor, peralatan, dana yang cukup, dan peralatan lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan/program tersebut.

3. Disposisi

Disposisi berarti watak dan kualitas pelaksana, Yaitu mencakup komitmen, kejujuran, hakikat demokrasi. Ada tiga bentuk sikap/reaksi terhadap suatu kebijakan. Artinya, arah/arahan pelaksana menanggapi program terhadap persepsi pelaksana, penerimaan atau penolakan, dan kekuatan tanggapan. Pelaksana mungkin memahami maksud dan tujuan program, tetapi tidak dapat melaksanakan program dengan baik karena menolak tujuan yang terkandung dalam program, meninggalkan peluang untuk mengganggu dan menghindari pelaksanaan program. Dalam proses tercapainya tujuan suatu program, seperti kepemimpinan, membutuhkan banyak dukungan eksekutif, karena memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan program untuk mencapainya secara efektif dan efisien.

4. Struktur

Struktur organisasi birokrasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan memegang peranan penting. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. (Aisah et al., 2021) Salah satu aspek penting dari sebuah organisasi adalah adanya standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi pedoman tindakan.

D. Problematika Pendidikan

1. Dimensi Kepemimpinan

Arah pendidikan disesuaikan dengan keadaan dan kepentingan penguasa, dan jika penguasa membutuhkan kekuasaan politik, pendidikan diarahkan ke arah itu. Indonesia telah mengalami orde lama, orde baru, reformasi, dan perubahan model pemerintahan yang berbeda dengan masa kini, atau biasa disebut dengan transisi demokrasi. Setiap era tentu mempengaruhi arah pendidikan di Indonesia saat ini.

Pendidikan seringkali diorientasikan sebagai alat untuk kepentingan tertentu seperti kepentingan ideologis dan politik. Misalnya, di zaman orde baru, pendidikan lebih sering dijadikan alat kekuasaan dan menghapus esensi pendidikan. Kondisi ini memengaruhi keberpihakan pada atasan Anda dan menghilangkan hak dan otoritas profesional. (Nasution, 2019)

2. Kesenjangan Pendidikan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kualitas pendidikan yang buruk. Padahal pendidikan merupakan aset terpenting kemajuan bangsa. Adapun kekurangan dalam pendidikan yang berada di Indonesia ini seperti halnya :

a. Sarana prasarana

Banyak sekali perbedaan kualitas dalam hal sarana dan prasarana yang terjadi di berbagai sekolah di Indonesia ini seperti di kota, desa, dan desa yang sangat terpelosok atau terpencil. Hal ini mungkin sudah kita ketahui dari berbagai platform berita bahwa kualitas sarana prasarana di sekolah perkotaan lebih baik daripada yang di desa atau bahkan yang di desa terpencil yang sangat tidak layak. Adapun kondisi bangunan sekolahnya mungkin akan sangat jauh berbeda dan bisa dikatakan tidak layak seperti halnya bangunan yang hampir rubuh dan sangat tidak terawat. (Nasution, 2019)

b. Tenaga Pendidik

Profesionalisme guru menjadi keharusan untuk mewujudkan sekolah berbasis pengetahuan, yaitu pemahaman tentang pembelajaran, kurikulum, dan perkembangan manusia termasuk gaya belajar. (Afifah, 2015) Kualitas dari seorang guru sekarang menjadi hal yang sangat dipertimbangkan karena bisa dikatakan kurang memadai. Akan tetapi ini tidak dapat di judge begitu saja karena kita harus mengakui juga jumlah guru yang sedikit menyebabkan tidak meratanya penyebaran guru ini di seluruh Indonesia.

Jumlah guru yang tidak memadai biasanya terjadi di daerah terpelosok atau terpencil, kemudian daerah tersebut di perbatasan dengan negara lain. Berbeda dengan di perkotaan yang terjadi penumpukan guru karena sarana prasarannya lengkap, bahkan dalam pendidikan di sebuah sekolah dasar saja dalam satu sekolah bisa samapai sebelas sampai empat belas orang guru, yang didalamnya termasuk kepek dan wakepek. Maka dari itu guru yang bertempatan di perkotaan akan bertahan dan terus maju dan guru di daerah

terpencil akan semakin terpuruk jika pemerintah tidak memperhatikannya.(Amelia, 2019)

c. Masalah Kurikulum Pendidikan

Masalah kurikulum meliputi masalah konsep dan juga pelaksanaannya. Kurikulum di Indonesia masih terbilang sangat kompleks dibandingkan kurikulum pendidikan negara lain. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya siswa yang merasa terbebani dengan sejumlah materi yang harus dipahami. Selain itu, tugas administrasi guru semakin meningkat sehingga dalam mengajar kurang maksimal.(Amelia, 2019)

d. Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Covid-19 dan Problematika nya

Pandemi Covid-19 berdampak besar pada banyak aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan, metode pembelajaran, guru, siswa, proses belajar orang tua, dan kurikulum yang berubah dari situasi ke situasi. Nadym Makaliem, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, berlangsung secara online pada 17 Maret 2020 dan mudik guna mencegah penyebaran Covid 19 sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi.

Kementerian Agama selaku Kepala Penyelenggara Pendidikan Agama Islam telah menerbitkan Pedoman Kurikulum Darurat Madrasah untuk mendukung pembelajaran di masa Pandemi Covid 19, sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Pendidikan Agama Islam No. 2791. 2020. Hal-hal yang ditonjolkan dalam kurikulum darurat ini terkait dengan pengembangan kepribadian, kepribadian mulia, Ubudya, dan kemandirian siswa. Namun demikian, aspek kemampuan dasar dan inti masih menjadi perhatian.

Hal ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 perlu menggunakan teknologi dan jaringan internet untuk menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan era normalisasi baru (new normalization). Pembelajaran online menjadi tantangan bagi seluruh pendidik Indonesia, mengingat baru pertama kali dilakukan secara besar-besaran di Indonesia. Melakukan pembelajaran online membutuhkan komunikasi yang baik antara siswa, sekolah dan orang tua. Komunikasi yang terjalin antara siswa, sekolah, dan orang tua hanya dapat dilakukan secara virtual. Manajemen iptek yang kurang baik menyebabkan terhambatnya perkembangan sekolah selama masa pandemi.(Nadhiroh, 2021)

E. Metodologi Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan

Rian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun (Syamsuddin, 2016) mengutarakan ada beberapa keadaan yang diperlukan dalam metodologi implementasi kebijakan pendidikan, diantaranya:

1. Keadaan luar yang dilihat oleh organisasi atau kantor pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar.
2. Apakah ada cukup aset yang dapat diakses untuk melaksanakannya, termasuk aset waktu.
3. Apakah pembaruan aset yang diperlukan benar-benar ada.
4. Apakah pengaturan yang dilakukan berdasarkan hubungan kausal dan andal.
5. Banyaknya hubungan sebab akibat yang terjadi. Anggapannya semakin sedikit keadaan dan koneksi hasil logi maka semakin tinggi hasil yang diinginkan oleh strategi dapat dicapai.
6. Apakah hubungan asosiasi kecil. Anggapannya yang akan terjadi adalah dengan asumsi hubungan ketergantungan tinggi maka eksekusi tidak dapat berjalan dengan baik.
7. Pemahaman yang mendalam dan penyelesaian pada tujuan.
8. Tugas telah diperinci dan diajukan dalam permintaan yang tepat.
9. Korespondensi dan koordinasi yang luar biasa.
10. Orang-orang yang memiliki kekuatan kekuasaan dapat menuntut dan memperoleh kepatuhan yang luar biasa.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan hal yang krusial dan dalam pelaksanaannya harus selalu dilakukan pemantauan serta evaluasi. Dalam implementasi kebijakan pendidikan bisa dilakukan dengan melalui pendekatan *top down*, *bottom up*, prosedural dan manajerial, serta pendekatan politik. Implementasi kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur. Dalam menentukan suatu kebijakan pendidikan, harus mengamati dan menyesuaikan keadaan atau perubahan zaman yang terjadi. Seperti contoh diterapkannya pembelajaran daring saat dunia dilanda pandemic Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N. (2015). Problematika Pendidikan di Indonesia (Telaah dari Aspek Pembelajaran). *Jurnal Pendidikan*, 1(Vol. 1 Januari 2015: Jurnal Pendidikan), 41–74. <https://unimuda.e-journal.id/jurnalpendidikan/article/view/148>
- Aisah, H., Zaqiah, Q. Y., & Supiana, A. (2021). Implementasi Kebijakan Asesmen Kemampuan Minimum (AKM): Analisis Implementasi Kebijakan AKM. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 1(2), 128–135. <http://ejournal.stit-alquraniyah.ac.id/index.php/jpia/>
- Amelia, C. (2019). Problematika Pendidikan di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan V* (Vol. 3).
- Anwar, M. E. (2014). Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia. *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, 03(Januari), 483–496.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan* (T. Siregar (ed.); 1st ed.). K-Media.
- Azza N, F., Setiawan, F., Saputra, R., Yuliatin, A. T., & Ilham, M. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 4(2), 362–365. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v4i2.3254>
- Fatayati, I. (2019). *Kesiapan MI Ma'arif Sendang Kulon Progo dalam Menyikapi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)*.
- Kemendikbud RI. (2020). *Arti kata implementasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. <https://kbbi.web.id/implementasi>
- Mulyono. (2009). *Model Implementasi kebijakan George Edward III*. <https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/>
- Nadhiroh, U. N. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Era New Normal Terhadap Pembentukan Akhlak Peserta Didik. *Al-Fikri: Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 4(2), 152–164.
- Nasution, E. (2019). Problematika Pendidikan di Indonesia. *Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah LAIN Ambon*, 1–10.
- Setiawan, F., Azza, F., Saputra, R., Yuliatin, A. T., & Ilham, M. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129–153. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58>
- Setiawan, F., Triyana, F., Fitri Arum Sari, K., & Andini. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam di Sekolah. *JURNAL PUSAKA*, 10(1 SE-Articles), 22–29. <https://doi.org/10.6084/ps.v10i1.580>
- Syamsuddin, M. (2016). *Implementasi Kebijakan Pendidikan*. <Http://Tunailmu.Blogspot.Com/2016/10/Implementasi-Kebijakan-Pendidikan.Html?M=1>.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129–153. <https://doi.org/10.52030/ATTADBIR.V30I2.58>